

# **Keberpihakan dan Konsistensi Seorang Intelektual**

Sorotan Terhadap Buku

*Radikalisme Kaum Pinggiran:*

*Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan<sup>1</sup>*

Oleh : Dr. Herwandi, M. Hum<sup>2</sup>

1

Dengan sadar saya mengatakan bahwa buku ini sangat menarik untuk dibaca. Penulisnya dengan cara sendiri mampu membawa pembacanya ke persoalan yang mengitari masalah kaum pinggiran, yang setelah berabad-abad diperlakukan tidak manusiawi, tidak hanya sebatas pengungkapan fakta tetapi mampu mengipas emosi sehingga menyentuh rasa yang paling dalam, yang kemudian bermuara munculkan dan mengharuskan kita melakukan perenungan. Penulisnya berhasil meresapi persoalan esensial, dan secara sadar, dengan total berhasil menyemplungkan “dirinya” ke dalam persoalan kehidupan kaum pinggiran yang sangat memprihatinkan karena adanya eksploitasi yang tak terhingga dari pihak-pihak tertentu. Artinya penulisnya secara sadar telah terlibat secara subjektif, sehingga wajar saja muncullah istilah-istilah yang bersifat emosional dalam menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat pinggiran tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, jujur saja, buku ini sarat dengan muatan keberpihakan, bias, dan subjektivitas. Lalu kalau begitu apakah ia lantas menjadi sampah yang kemudian dibuang. Atau, justru di sisi inilah ia mempunyai kekuatan.

Tulisan ini mencoba menyoroti **keberpihakan** seorang intelektual dalam karya-karyanya, yang seharusnya melahirkan karya yang objektif, *balance*, tidak subjektif, bukan berat sebelah.

2

Sasaran utama dalam kajian buku Adam ini adalah kaum yang menduduki strata terlemah dalam strata ekonomi, yang disebutnya dengan kaum pinggiran. Di dalam buku ini tidak ditemukan definisi yang definitif-komprehensif tentang kaum pinggiran (*marginal community*). Secara harfiah barangkali, esensi pengertian kaum pinggiran itu adalah kaum yang terpinggirkan (atau sengaja dipinggirkan) baik secara

---

<sup>1</sup>Pengantar diskusi yang dipresentasikan pada Bedah Buku di Pakan Baru, Riau, pada tanggal 28 Juni 2003

<sup>2</sup>Kepala Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas dan Staf Pengajar Fak. Sastra Univ. Andalas Padang.

sosial ekonomis maupun politis. Apa yang dimaksud oleh penulisnya tentang kaum pinggiran dapat dilihat pada halaman xiv yang secara eksplisit dinyatakan bahwa kaum pinggiran itu adalah para buruh, petani, dan mahasiswa. Pengertian yang dipergunakan oleh penulisnya barangkali tidaklah memadai, sebab masih ada masyarakat lainnya yang dapat dimasukkan sebagai kaum pinggiran, sebutlah misalnya para nelayan yang nasibnya kadangkala jauh lebih memprihatinkan dari yang lainnya. Oleh sebab itu barangkali persoalan yang melilit para nelayan akan dapat memperkaya data dan memberikan nuansa tersendiri bagi buku ini.

Marginalisasi dan pemiskinan kaum pinggiran itu sepertinya bukanlah hal yang timbul begitu saja, tetapi merupakan akumulasi dari kebijakan yang dilakukan oleh penguasa yang berkolaborasi dengan tangan-tangan berkepentingan seperti pengusaha dan politisi yang mengharapkan dukungan tenaga dan suara dalam membangun bisnis dan politik mereka. Para petani dan kaum buruh telah menjadi bulan-bulanan akibat kolaborasi antara penguasa dengan pengusaha sedangkan mahasiswa dan masyarakat akarrumput dalam pemilu menjadi orang yang terlupakan dalam kegiatan politis akibat kebijaksanaan penguasa dan para politisi. Dalam buku ini telah dibuatkan skema hubungan kaum pinggiran dengan pihak penguasa dan pengusaha, dan jelas kelihatan adanya hubungan segitiga yang baku hubungan tersebut. Skema hubungan tersebut kelihatan betapa telah terjadi kolusi yang begitu intens antara penguasa dan pengusaha dalam proses marginalisasi kaum pinggiran dalam setiap kebijaksanaan pemerintah(hal. 4). Skema ini sebetulnya hanya merupakan prototipe saja karena kalau diperhatikan skema tersebut tidak menggambarkan secara menyeluruh yang mewakili seluruh kaum pinggiran. Dalam skema tersebut hanya disebutkan kaum buruh saja, sementara petani, dan mahasiswa tidak disebutkan secara eksplisit. Barangkali kaum buruh adalah wakil kaum pinggiran yang di dalam tersirat adanya eksistensi kaum petani dan mahasiswa secara umum.

Pada intinya, buku ini bersandarkan kepada teori gerakan sosial. Di dalam teori gerakan sosial, radikalisme yang diekpresikan oleh kaum pinggiran adalah semacam gerakan sosial (*social movement*), yang didalamnya dapat tercakup *movement*, *resistensi*, revolusi, dan evolusi. *Movement* adalah gerakan yang bersifat perlawanan yang telah dipersiapkan dengan matang, *resistensi* adalah gerakan perlawanan yang bersifat spontan, sedangkan revolusi yaitu gerakan revolusioner (mengharapkan perubahan yang cepat dan mendasar) menentang kekuatan superior penjajah dari pihak yang dijajah, dan evolusi yaitu suatu gerakan yang berjalan secara lambat yang tidak memperlihatkan hasil yang begitu berarti, tetapi secara lambat-lambat dapat melakukan perubahan dalam masyarakat. Menurut Sartono Kartodirdjo, gerakan sosial dalam sejarah Indonesia mencakup fenomena historis seperti perbanditan sosial, *revivalisme* (menghidupkan kembali), *revitalisme* (menghidupkan kembali), gerakan ratu adil (*mellinearisme*), juru selamat (*messianisme*) dan gerakan perang sabil, *nativisme* (menghidupkan kembali nilai lama), *kenabian* (*propethisme*) kesemuanya itu merupakan manifestasi dari usaha kolektif untuk mengadakan atau menolak perubahan kehidupan dalam masyarakat (Kartodirdjo 1970; 1987). Dalam hubungannya dengan radikalisme kaum pinggiran, gejala-gejala tersebut barangkali dapat digolongkan se-

bagai gerakan sosial lama yang cenderung bersifat struktural, yaitu adanya usaha untuk merubah tatanan sosial, menghilangkan kelas sosial yang telah mengkondisikan nasib kaum pinggiran tersebut. Mansoer Faqih dan Rajendra Singh telah mengelompokkan gerakan sosial atas dua pola umum, struktural dan non struktural. Pada gerakan sosial yang berpola struktural, corak perlawanan disebabkan oleh perbedaan kelas yang tajam. Pola ini akan terlihat dalam gerakan kaum buruh di Ombilin, gerakan buruh petani di Riau, pembangkangan petani Minangkabau terhadap kolonial Belanda, gerakan buruh medan, serta gerakan massa akar-rumput dalam pemilu 1999 di Padang. Sedangkan gerakan non-struktural yang dapat digolongkan sebagai gerakan sosial baru, cirinya menekankan perlawanan tan-pa kelas seperti gerakan mahasiswa.

### 3

Buku ini telah memperlihatkan bahwa sejarah Indonesia perlu mengapungkan sejarah masyarakat “bawah”, dan perlu ditulis dari sudut pandangan “arus bawah”. Artinya sejarah Indonesia jangan pula memarginalkan masyarakat marginal dalam penulisan sejarah. Sejarah harus dilihat dari kepentingan-kepentingan masyarakat bawah. Dalam hubungan dengan itu, dalam diskusi-diskusi lepas Adam sering mengemukakan istilah sejarahwan borjuis dan sejarahwan non borjuis (mungkin yang dimaksud adalah proletar?). Sejarahwan borjuis dianggapnya memberikan tekanan yang lebih terhadap pihak-pihak penguasa dan pengusaha (kelas atas), sementara terhadap masyarakat kecil (kelas bawah) menjadi hal yang dipinggirkan, atau setidaknya diberikan porsi yang tidak begitu memadai. Di dalam buku ini kelihatan betapa Adam telah membuktikan bahwa ia telah memberikan porsi yang besar mengapungkan kepentingan-kepentingan masyarakat pinggiran.

Di dalam buku ini, Adam telah melakukan keberpihakan yang besar. Hal ini dilakukannya secara sadar (hal. 12). Adam beranjak dari keprihatinannya tentang posisi ilmu yang selama ini berada dalam posisi yang bersifat *balance*, bebas nilai, yang pada akhirnya dengan posisi itu dapat dipergunakan oleh tangan-tangan tertentu ke arah yang bersifat mencelakai pihak lain. Dengan kalimat yang jelas ia mengemukakan bahwa “ketika ilmu tidak memiliki basis pemihakan yang jelas, ia menjadi bisa yang lebih jahat dibandingkan dengan penjahat. Hal ini disebabkan oleh sifat netral ilmu yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan tekanan, pembealaan, atau bahkan justifikasi atas kejahatan yang dilakukan oleh pihak tertentu”. Pada tataran ini barangkali kita setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Adam, bahwa ilmu dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Namun demikian yang persoalan adalah apakah dengan berdasarkan kepada keresahan seperti itu, lantas ilmu dapat saja melakukan pemihakan. Di dalam kehidupan keilmiah sudah jelas aturan mainnya. Seorang ilmu harus memberikan data yang seimbang, sehingga memberikan gambaran lengkap, tentang suatu objek kajian. Ia harus mengejar dan memberikan informasi dari semua kalangan yang terkait dalam suatu objek kajian, sehingga memberikan informasi yang *balance*. Dari kasus eksploitasi buruh Semen Padang (SP) misalnya, semenjak awal telah menempatkan pihak SP dalam posisi “tertuduh” (tanpa

berniat membela SP), sehingga tidak kelihatan bagaimana usaha pihak SP melakukan pembenaran terhadap kinerja yang dilakukannya selama ini. Begitu juga dalam kasus gerakan buruh dan petani di Riau, sepertinya tidak diungkapkan kepentingan pihak-pihak pengusaha yang terlibat dalam bisnis perkebunan di daerah tersebut. Barangkali dalam buku ini perlu diberikan data dan fakta yang seimbang. Dari informasi yang seimbang itulah nanti akan diambil suatu konklusi. Pada tahap inilah barangkali baru disahkan dilakukan keberpihakan. Kalau keberpihakan itu dilakukan sebelumnya maka, karya tersebut kelihatan berbau tendensius yang penuh dengan subjektivitas.

Terakhir saya ingin mengutip apa yang dikemukakan oleh seorang ahli etika keilmuan, Magnis Suseno. Magnis Suseno pernah mengemukakan bahwa sesungguhnya seorang ilmuwan itu tak pernah benar-benar objektif seperti apa yang dituntut oleh etika keilmuannya sendiri, karena dalam memilih dan mengerjakan tugasnya, ilmuwan semenjak awal telah mengusung norma dan nilai-nilai tertentu. Semenjak awal ilmuwan telah melibatkan interes pribadi, yang dibaluti oleh norma dan nilai tersebut. Seorang dokter ingin mengambil spesialisasi penyakit dalam karena di dalam masyarakat, tanggungannya, atau bahkan saudaranya terjangkiti penyakit TBC, ginjal, dan sejenisnya. Seorang muslim banyak menulis tentang Islam, karena disamping mereka ingin mengungkap aspek keislaman itu, ia dapat beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Artinya semenjak awal seorang ilmuwan itu telah dibaluti oleh interes-teres pribadi, yang kemudian ikut mewarnai pekerjaan mereka.

#### 4

Buku ini telah dikerjakan sangat serius oleh penulisnya, tetapi kalau dicermati akan ditemukan betapa konsep yang telah didudukkan secara baik di bagian awal tidak dipakai di dalam bagian tertentu. Kasus buruh *angkek* di Bukittinggi, adalah kasus tertentu yang seakan memperlihatkan ketidakkonsistenan penulisnya. Di Bukittinggi, seperti yang dijabarkan pada bagian sembilan (hal. 209-220), telah terjalin hubungan baik antara induk semang dengan para buruh *angkek*, dan dalam uraian tersebut tidak terjadi gerakan.

Di dalam buku ini juga terapat banyak sekali kesalahan ketik yang sangat mengganggu pembaca. Kesalahan ketik itu dapat berupa pengabaian etika pengetikan istilah selain berasal dari bahasa Indonesia baku, seperti bahasa daerah dan bahasa asing (yang harus ditebalkan/dimiringkan) dan dapat saja berupa kesalahan mengetik huruf atau kata (terdapat puluhan, sebutlah misalnya istilah *buruh angkek* yang ditulis dengan *buruh angket* di halaman vi dan 210, *andema* yang ditulis dengan *andame* di halaman 182). Kesalahan itu barangkali dapat dimaafkan kalau tidak merubah kensepsi, tetapi sayangnya pembaca akan merasa kebingungan di beberapa tempat karena kesalahan pengetikan satu kata telah merubah kensepsi satu kalimat, seperti yang dijumpai pada hal. 51 (alinea 2) berbunyi:

“Adakalanya faktor ideologi tidak ada dalam gerakan sosial. Massa akar rumput misalnya, walaupun berpihak pada gerakan, namun mereka tidak memahami (baca: memahami) ideologi yang dijadikan basis gerakan”.

Bahkan kesalahan ketik itu dapat merancukan maksud yang dijabarkan oleh satu alinea, sebagai contoh dapat dilihat di halaman 79 (alinea 1), sebagaimana tertulis

“...Organisasi yang secara kontinyu menjadikan buruh tambang batu bara Ombilin sebagai lahan garapan PKI. Hal itu dapat dipahami, karena ajaran komunikasi (baca: komunis) ini lahir sebagai dampak penindasan yang dilakukan pihak majikan. Perkembangan komunis bertepatan dengan gejolak politik yang telah berkembang sejak awal abad ke-20 di Minangkabau. Usaha komunis itu cukup cukup berhasil ditandai dengan berkembangnya komunis di kalangan seperti buruh, petani dan terpelajar. Menyimak kehadiran PKI di Minangkabau, pola organisasi modern ini telah dipraktekkan. Prakteknya terlihat, ketika komunikasi (baca: komunis) merekrut buruh tambang batu bara Ombilin.....”